

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis data tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024" adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Peningkatan DAU tidak serta merta mendorong peningkatan alokasi belanja modal karena sebagian besar DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja pegawai.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sifat DAK sebagai *specific grant* yang diarahkan langsung untuk kegiatan pembangunan fisik terbukti efektif mendorong peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya variasi variabel dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti Dana Bagi Hasil (DBH), pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal lainnya.
2. Terdapat ketidaklengkapan publikasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada beberapa kabupaten/kota tertentu di Provinsi Jawa Tengah, sehingga terdapat kesulitan dalam mengakses data secara langsung melalui situs resmi masing-masing pemerintah daerah.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pooled Ordinary Least Squares (OLS) dengan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu tiga tahun (2022–2024), sehingga belum dapat menangkap dinamika hubungan antarvariabel dalam jangka panjang maupun heterogenitas karakteristik fiskal yang bersifat spesifik pada masing-masing Kabupaten/Kota dari waktu ke waktu.
4. Penelitian ini hanya menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal secara satu arah, sehingga belum mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan kausalitas terbalik (*reverse causality*), di mana realisasi Belanja Modal pada periode sebelumnya juga dapat memengaruhi besaran DAU dan DAK yang diterima daerah pada periode berikutnya.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka

saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat kemandirian fiskal. DBH perlu dimasukkan karena besarnya mencerminkan potensi ekonomi daerah penghasil sumber daya, sehingga dapat memperluas kapasitas fiskal dan mendukung perencanaan Belanja Modal jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah perlu diikutsertakan karena pertumbuhan yang tinggi menciptakan permintaan infrastruktur baru sekaligus menghasilkan efek pengganda dari peningkatan Belanja Modal. Lebih lanjut, tingkat kemandirian fiskal diperlukan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai Belanja Modal secara mandiri serta membedakan pengaruh PAD secara absolut maupun proporsional terhadap total pendapatan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut diharapkan dapat melengkapi model dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai determinan Belanja Modal daerah.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan provinsi lain yang memiliki publikasi Laporan Realisasi Anggaran lebih lengkap dan mudah diakses, sehingga kualitas data yang diperoleh lebih terjamin. Apabila tetap menggunakan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian, disarankan agar kelengkapan data lebih diperhatikan dengan melakukan akses langsung ke kantor pemerintah daerah kabupaten/kota terkait, sehingga data yang digunakan dapat lebih lengkap, akurat, dan dapat

diverifikasi secara langsung.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan menjadi lebih dari tiga tahun guna memperoleh gambaran hubungan antarvariabel dalam jangka panjang, serta menggunakan metode analisis data panel yang lebih komprehensif, seperti Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Perluasan periode waktu tersebut memungkinkan peneliti untuk menangkap pola perubahan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kondisi riil dan mendukung perencanaan kebijakan fiskal daerah.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kemungkinan hubungan kausalitas terbalik antara Belanja Modal dengan DAU dan DAK menggunakan pendekatan data panel simultan, seperti model persamaan simultan (simultaneous equation model) berbasis data panel). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap hubungan dua arah antarvariabel secara lebih komprehensif, sehingga dapat diketahui apakah Belanja Modal semata-mata dipengaruhi oleh dana transfer, ataukah realisasi Belanja Modal pada periode sebelumnya turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan besaran DAU dan DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah pada periode berikutnya.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teori

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya dalam memperkuat relevansi teori desentralisasi fiskal sebagai grand theory dalam memahami perilaku belanja pemerintah daerah. Temuan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah yang lebih tinggi mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Sementara itu, signifikansi DAK dalam mendorong belanja modal menunjukkan bahwa mekanisme specific grant yang disertai arah penggunaan yang jelas merupakan instrumen transfer fiskal yang lebih efektif dibandingkan block grant dalam konteks peningkatan investasi publik daerah.

Selain itu, penelitian ini turut memperkuat relevansi Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) sebagai supporting theory dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa hubungan keagenan antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent turut memengaruhi pola alokasi belanja modal. Pemerintah daerah sebagai agen tidak selalu bertindak sepenuhnya sesuai dengan harapan principal, yang tercermin dari penggunaan DAU yang lebih banyak diarahkan pada belanja operasional daripada belanja

modal. Kondisi ini sejalan dengan asumsi teori agensi mengenai perilaku oportunistik agen akibat adanya asimetri informasi. Hasil ini memperkaya literatur empiris tentang pengaruh struktur pendapatan daerah terhadap keputusan alokasi anggaran, sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya.

5.3.2 Implikasi Praktik

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembiayaan belanja modal. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara lebih produktif, serta peningkatan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD baru merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai investasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, temuan penelitian ini mengisyaratkan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kabupaten/kota, khususnya dalam mendorong proporsi belanja modal yang lebih tinggi dalam struktur APBD. Provinsi dapat berperan sebagai fasilitator yang mendorong efisiensi penggunaan dana transfer serta mendorong daerah agar tidak terjebak dalam pola belanja

yang terlalu besar pada kegiatan operasional. Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan transfer daerah yang lebih terarah. Skema DAK yang terbukti efektif dalam mendorong belanja modal perlu dipertahankan dan diperkuat, sementara mekanisme monitoring penggunaan DAU perlu diperketat agar dana tersebut dapat lebih berkontribusi pada kegiatan pembangunan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga alokasi belanja modal benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.